

Pemanfaatan

Jadi kami mengumpulkan data-data dan informasi berkaitan dengan itu di daerah lain. Seperti Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Selasa (20/9).

Noviar mengatakan, dasar penertiban itu dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Dimana pihak yang mengelola TKD wajib mendapat izin dari Gubernur DIY atau Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Selain itu, apabila mereka ingin mendirikan bangunan wajib

melengkapi persyaratan seperti dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Pemkab.

Namun berdasarkan temuan yang ada di lapangan, ada beberapa di antara mereka belum bisa memenuhi ketentuan yang ada. Seperti pemakaian tanah kas desa yang tidak memiliki izin gubernur. Pemanfaatan tanah kas desa didirikan bangunan tanpa IMB dari kabupaten serta beberapa lainnya.

"Pemanfaatan TKD juga harus sesuai peruntukannya seperti yang diajukan dalam izin. Misalnya izin yang dikeluarkan untuk tempat wisata tapi yang dibangun vila. Sementara itu vila tersebut juga tidak ada IMB-nya.

Selain itu ada juga tanah kas desa yang dibangun tapi belum ada izin gubernur namun dibangun perumahan dan diperjual belikan," tangranya.

Menurut Noviar, seandainya dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, pihak yang melanggar aturan soal TKD akan diberi surat peringatan hingga diminta membuat surat pernyataan untuk segera melengkapi izin dan persyaratan. Apabila hal itu tidak dilaksanakan, Gubernur DIY bisa saja mencabut izin pengelolaan TKD sewaktu-waktu. Sedangkan aset di atas tanah tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Desa. (Ria)-f

Sambungan hal 1

Diupayakan

"Kami bersama kementerian/lembaga dan unsur terkait, tengah berdiskusi mengupayakan ada subsidi untuk melakukan konversi dari kendaraan BBM ke listrik. Khususnya untuk sepeda motor," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (20/9).

Menhub mengatakan, subsidi konversi dapat dilakukan dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM. "Dari Pemerintah Daerah juga bisa menginisiasi untuk mengalihkan anggaran yang kurang produktif, agar dialihkan untuk memberikan subsidi biaya konversi ke kendaraan listrik," ujarnya.

Saat ini biaya untuk melakukan konversi sepeda motor BBM ke

listrik masih cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 15 juta.

"Namun demikian, jika permintaan kian meningkat, dan bengkel-bengkel yang mampu melayani konversi sudah semakin banyak, diharapkan harganya akan semakin kompetitif," kata Menhub.

Upaya lain yang telah dilakukan Kemenhub untuk mempercepat hadirnya KBLBB secara massal di Indonesia, yaitu dengan menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik dibandingkan kendaraan konvensional (BBM). Misalnya, untuk biaya uji tipe sepeda motor listrik sebesar Rp 4,5 juta, dibandingkan sepeda motor konvensional Rp 9,5 juta.

"Ke depan kita upayakan uji tipe

Sambungan hal 1

Tahun

dan bisa menjalin komunikasi, koordinasi pada semua pihak," ungkap Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Brigjen TNI Puji Cahyono SIP MSi saat menyambut audiensi jajaran Direksi PT BP Kedaulatan Rakyat (KR), Selasa (20/9) di Makorem.

Didampingi jajaran perwira Korem 072/Pamungkas yaitu Kasipers Kasrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Wawan Indaryanto SPd, Kasilog Kasrem 072/Pamungkas Kolonel Cpl Achmad Djuardi, Kasiter Kasrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Gempar Sebayang, dan Kapenrem 072/Pamungkas Mayor Czi Agus Sriyanta, Danrem menyambut hangat jajaran Direksi SKH KR. "Yogya Istimewa juga mempunyai banyak sejarah, perjuangan kemerdekaan RI, sejarah TNI dan lainnya," ucap Danrem yang sudah 34 tahun bertugas di TNI AD dan selalu siap ditempatkan di mana saja.

Dalam kesempatan ini Dirut KR Wirmon Samawi dengan didampingi Komisaris Utama Prof Dr Inajati Andrisijanti, Direktur Pemasaran Fajar Kusumawardhani SE, Direktur Keuangan Imam Satriadi SH, Direktur

Umum Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSC, Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos, serta Redaktor Pelaksana KR Primaswolo Sudjono menyebutkan 40 hari setelah Kemerdekaan RI, SKH Kedaulatan Rakyat lahir pada 27 September 1945

"Karenanya dalam rangkaian HUT ke-77 SKH KR, seperti tahun-tahun sebelumnya melanjutkan kolaborasi KR dengan Korem 072/Pamungkas yang sudah berjalan baik selama ini, kami menyampaikan undangan untuk Bapak Danrem dengan permohonan memberikan izin pada prajurit TNI Wilayah Korem 072/Pamungkas agar bisa berpartisipasi mengikuti rangkaian kegiatan HUT KR," ungkap Wirmon

Disebutkan Bakti Sosial di masyarakat Yogyakarta dalam rangkaian HUT ke-77 KR dengan gelaran Donor Darah Bagi Masyarakat Umum, Rabu (21/9) pagi ini mulai pukul 09.00 - 14.00 WIB di Griya KR, Jalan Margo Utumo 40 Yogyakarta dengan target peserta 150 orang pendonor. "Seperti tahun-tahun sebelumnya kami harapkan prajurit TNI juga berpartisipasi," tutur Wirmon yang juga Ketua PMI

Sambungan hal 1

Sekali

calon peserta pemilu tentu membutuhkan sistem informasi. Di sisi yang lain digitalisasi sistem informasi menuntut tidak hanya infrastruktur pendukung yang memadai tapi juga sebuah ekosistem digital yang tidak sederhana.

Penggunaan Sipol dalam pemilu selalu mengundang perdebatan pro-kontra. Sebagian persoalan bersumber pada regulasi terutama peraturan KPU No 4 tahun 2022 yang sedikit banyak memiliki unsur otoritas dalam penggunaannya. Ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12 dalam peraturan KPU tersebut memerintahkan parpol calon peserta pemilu untuk menggunakan Sipol. Yang menjadi persoalan adalah apakah Sipol merupakan syarat wajib menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017?

Kalau mengacu pada pasal 176 UU No 7 Tahun 2017, tidak ditemukan adanya perintah dalam UU untuk menggunakan sistem informasi sebagai prasyarat sebagai peserta pemilu.

UU No 7 tahun 2017 hanya mensyaratkan partai calon peserta pemilu mengajukan pendaftaran dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Pendaftaran itu juga disertai dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 177 UU No 7 tahun 2017. Menurut pendapat penulis, mestinya syarat yang dicantumkan di UU No 7 tahun 2017 lebih merupakan syarat formil, kebenaran material dari syarat itu ditentukan proses verifikasi administratif.

Sebagai pembanding dalam UU yang sama, UU No 7 tahun 2017 memerintahkan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan (pasal 218 ayat (1)), dan mengatur agar sistem informasi data pemilih (kemudian menjadi Sidalih) diatur dalam peraturan KPU. (Pasal 218 ayat (3)). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan Sidalih dalam PKPU adalah

Sambungan hal 1

mandatori dan memang memiliki tujuan yang jelas. Tidak demikian halnya dengan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, hanya diperintahkan diatur dalam PKPU tapi tidak secara spesifik disebut tentang system informasi partai politik.

Pengaturan lebih lanjut dalam PKPU berkaitan dengan pemilu, tentu punya tujuan untuk memperjelas mekanisme dan tata cara proses electoral yang dimaksudkan untuk menjamin perlakuan yang sama, adil dan transparan terhadap peserta pemilu. Di sisi yang lain pengaturan lebih lanjut dalam PKPU sebagai turunan dari UU No 7 tahun 2017 harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental. Tidak boleh membebani calon peserta pemilu dengan regulasi yang memberatkan yang tidak diatur secara spesifik dalam UU No 7 tahun 2017. (Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia)-d

LAPTOP AMD RYZEN 6000 SERIES PROCESSORS Ajak Kreator Musik Makin Produktif

YOGYA (KR) - AMD memamerkan jajaran lengkap laptop bertengga AMD Ryzen 6000 Series Processors terbaru kepada generasi milenial dan gen Z di DIY khususnya yang memiliki passion musik. Prosesor ini mampu menghadirkan tingkatan performa grafis terintegrasi yang belum pernah ada sebelumnya, menawarkan gaming AAA 1080p revolusioner, bersama fitur-fitur terbaru seperti mempercepat proses rendering musik digital sehingga kreator makin produktif dan daya tahan baterai luar biasa.

Product and Retail Enablement Manager AMD Indonesia Donnie Brahmndhika mengatakan, prosesor terbaru ini dibangun di atas teknologi proses 6nm terdapan dan prosesor pertama yang menggabungkan arsitektur core Zen 3+ terbaru dan grafis AMD Radeon RDNA. Kinerja grafis yang dihasilkan terintegrasi terentang dengan performa gaming 1080p memukau pada game AAA.

"AMD Ryzen 6000 Series Processor adalah prosesor mobile pertama yang menam-



KR-Fira Nurfitri

Donnie Brahmndhika memaparkan AMD Ryzen 6000 Series Processors.

pilkan grafis berbasis arsitektur AMD RDNA 2 dengan performa grafis hingga dua kali lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. Ada dua pilihan, yaitu prosesor AMD Ryzen 6000 U-Series dengan TDP 15-28W dan prosesor AMD Ryzen 6000 H-Series dengan TDP mulai dari 35 Watt hingga 45 Watt," ujarnya dalam AMD Media Gathering 2022 di Auditorium IFI Yogyakarta, Selasa (20/9).

Donnie menyampaikan, untuk aplikasi mobile gaming, prosesor AMD Ryzen 6000 Series dapat dipasangkan dengan grafis AMD Radeon RX 6000 Series. AMD juga merilis kartu AMD Radeon RX 6000

M Series dengan tambahan kartu grafis mobile AMD Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M dan Radeon RX 6300M.

"AMD juga menghadirkan GPU AMD Radeon RX 6850M XT yang memiliki kinerja gaming 1440p terkencang bagi laptop premium generasi berikutnya. Ada pula jajaran kartu grafis mobile AMD Radeon RX 6000S terbaru yaitu AMD Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S dan Radeon RX 6600S. Lalu, GPU AMD Radeon RX 6800S kelas atas pada 100W menawarkan gaming 1080p terbaik," imbuhnya. (Ira)-d

Listrik

"Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan enggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif," ujar Arifin.

Untuk diketahui, PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik kepada pelanggan rumah tangga mampu non-subsidi golongan 3.500 VA ke atas. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM No T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2

Sambungan hal 1

Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (periode Juli-September 2022).

Dikutip dari siaran pers PT PLN (Persero), pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak mengalami perubahan tarif. Adapun tujuan dari penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan dimana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak. (Sim)-d

Brio

Mobil baru berhenti sejauh 150 meter, setelah menabarak 10 sepeda motor dan 1 sepeda kayuh. Korban lain yang mengalami kerusakan ringan ada yang langsung meninggalkan lokasi, sehingga tidak terdata.

Para korban yang bergelimpangan di pinggir jalan segera mendapat pertolongan dengan mengerahkan armada Ambulan dari PMI Bantul dan AmbulanMu terdekat.

Menurut Iptu Fikri, kondisi para korban yang

Sambungan hal 1

ditangani di RS PKU Muhammadiyah Bantul maupun RSUD Panembahan Senopati Bantul pada umumnya mengalami luka ringan.

Pengemudi Brio langsung diamankan di Mapolres Bantul untuk menjalani pemeriksaan. Mengenai kondisi pengemudi Brio kemungkinan dalam kondisi mabuk, menurut Iptu Fikri, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Nanti kami lakukan pemeriksaan," ucap Iptu Fikri. (Jdm)-f

Bekas

kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan.

Nurul mengatakan pimpinan sidang juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Briptu Sigid, yakni mutasi bersifat demosi selama satu tahun sejak dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanpa) Polri. "Atas putusan tersebut, pelanggaran menyatakan tidak banding," ucap Nurul.

Putusan Sidang Etik yang dibacakan pada Senin (19/9) menyatakan Briptu Sigid melanggar Pasal 5 ayat I10 huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Briptu Sigid Mukti Hanggono masuk dalam daftar 35 anggota Polri yang diduga kuat terlibat dalam ketidakprofesionalan saat penanganan tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, lokasi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

la dan 25 anggota Polri lainnya telah dimutasi dari jabatan sebelumnya ke Yanma Mabes

Sambungan hal 1

Polri dalam surat telegram Kapolri yang ditandatangani tanggal 22 Agustus 2022. Senin kemarin, sidang etik terkait penanganan kasus Brigadir J masih berlanjut. Sidang dilaksanakan untuk terduga pelanggaran Iptu Januar Arifin, mantan Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri yang dimutasi sebagai Yanma Polri. Dalam sidang tersebut

menghadirkan enam orang saksi, yakni Kombes Pol ANP (Agus Nur Patria), AKP IF (Idham Fadilah), Iptu HT (Hardista Pramana Tampubolon, Briptu SMH (Sigid Mukti Hanggono) dan dua saksi lainnya berinisial Aiptu SA, serta Aipda RJ (tidak masuk daftar mutasi terkait kasus Brigadir J). (Ant/Obi)-f



| Prakiraan Cuaca | | Rabu, 21 September 2022 | |
|-----------------|------|-------------------------|------------|
| Lokasi | Pagi | Cuaca | Kelembaban |
| Bantul | ☀ | ☁ | 23-31 |
| Sleman | ☀ | ☁ | 23-30 |
| Wates | ☀ | ☁ | 23-31 |
| Wonosari | ☀ | ☁ | 23-30 |
| Yogyakarta | ☀ | ☁ | 23-31 |

Dr. Ismadiyanti Purwaning Astuti, SE MSc
Dosen Prodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta

Masih Amankah Kondisi Pangan di Indonesia?

2022 meningkat 1,13% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 275,77 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan angka kelahiran yang semakin meningkat perlu diwaspadai oleh pemerintah. Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan nasional. Kebutuhan pangan saat ini tidak hanya di penuhi oleh hasil produksi pangan dalam negeri tetapi juga melalui ekspor.

Pangan menjadi sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup. Menurut Food and Agricultural Organization (FAO), pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan yang sesuai dengan konteks ketahanan pangan nasional difokuskan pada jenis pangan yang didominasi oleh kandungan karbohidrat seperti beras, gandum, jagung, ketela, singkong, jenis ubi-ubian dan jenis ketela.

Produksi padi di Indonesia selama 20 tahun terakhir relative stabil yaitu 54 juta ton per tahun. Produksi beras pada tahun 2022 diperkirakan oleh BPS meningkat 14,63 juta ton atau naik 1,05 juta ton atau 7,70 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dihitung dari meningkatnya luas panen padi mencapai 4,81 juta ton atau naik 0,38 juta hektar. Total produksi gabah kering juga mengalami peningkatan seiring naiknya produksi padi yaitu mencapai 25,40 juta hektar.

Komoditas pangan yang lain seperti gandum menjadi bahan baku tepung terigu. Tepung terigu menjadi bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam kesehariannya seperti mie instan, roti, gorengan dan lain-lain. Gandum merupakan tanaman yang bukan berasal dari Indonesia sehingga untuk memenuhi kebutuhan masih dilakukan impor dari negara-negara di Eropa. Produksi Komoditas gandum mengalami penurunan karena kekeringan di Uni Eropa dan permasalahan distribusi permasalah yang dikarenakan perang Rusia dan Ukraina.

Jumlah penurunan produksi gandum sebesar 1 persen yaitu dari 778,3 juta ton pada tahun 2021 menjadi 770,3 juta di tahun 2022.

Teori Maltus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung. Hal itu dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan pangan. Dalam jangka panjang, manusia dapat mengalami krisis pangan jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa produktivitas pertanian yang ditingkatkan harus dibarengi oleh Jumlah penduduk yang semakin banyak harus diimbangi dengan peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan produktivitas.

Pemerintah harus memperhatikan dengan tepat jumlah kebutuhan masyarakat akan komoditas pangan yang dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri atau apabila kurang dapat dilakukan impor. Ketergantungan masyarakat Indonesia kepada beras cukup besar sehingga perlu dilakukan diversifikasi produk pangan. Indonesia banyak memiliki hasil tanam yang dapat menggantikan beras seperti jagung, ketela, sagu dan lain-lain. Pemerintah harus memberikan anjuran kepada masyarakat untuk mengkonsumsi dan mengembangkan makanan olahan dengan bahan selain beras dan gandum.

Produksi pangan harus ditingkatkan dengan mengubah cara pola tanam yang tradisional menjadi pola tanam yang lebih modern dimana tata kelola lahan lebih hemat tenaga dan biaya tetapi hasil yang didapat lebih banyak. Hasil pertanian yang masing tergantung kepada musim harus dapat diubah dengan penanaman lahan sepanjang tahun sehingga lahan selalu produktif.

Sebagai contoh, saat musim hujan hasil padi di Indonesia mengalami panen raya, sedangkan musim panas mengalami paceklik sehingga dalam mengatasi hal tersebut perlu pengembangan pengelolaan hasil pertanian menjadi lebih tahan lama. ***

